

DAFTAR PUSTAKA

- Andjani, S., Hadiwirawan, O., Sokang, Y.A. (2016). *Current Discussion, Barries, and Existing Stigma*. *Journal Indonesian Feminist*, 4(1), 101-111.
- Artina, D. (2016). *Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*. *Jurnal Hukum Ius Quita Iustum*, 1(23), 123-141.
- Aziza, A. D. (2016). *Rekrutmen dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Samarinda Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1489-1498.
- Candraningrum, D. (2014). *Pengarustamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan & Tata Kelola Pemerintahan*. *Jurnal Perempuan*, 19 (4), 123-140.
- Dahlerup, D. (2002). *Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan*, dalam *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. IDEA.
- Daryono, S., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2019). *Konflik Gender dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019*. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 1-79.
- Getrintya, S. (2017). *Kuota Perempuan di Parlemen Belum Tercapai*. Tirto.id, Diakses Pada 27 Maret 2023 Pukul 02.30 WIB.
- Hardjaloka, L. (2012). *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu, in Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara*.

- Hutington, S., Nelson, M. (1997). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Irma, L. (2011). *Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan*. Tesis UI.
- Junaenah, I. (2014). *Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Demokratis*. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 221-232.
- Jurdi, S. (2019). *Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara*. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu.
- Lestari, S., Marwah, S., & Pratiwi, O. C. (2017). *Potret Pembangunan Manusia Berbasis Gender di Kabupaten Banyumas Tahun 2015*. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers: Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VII, 1627-1635.
- Lindo, D. (2016). *Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14-28.
- Mardiana. (2020). *Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc : Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi*. *Politika : Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 96-114.
- Parawansa, K. I. *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. Studi Kasus.
- Phillips, Anne. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford University Press : New York.

- Prastyawan, A., Lestari, Y., Mardliah, S., Dewi, P.A.R., & Gamaputra, G. (2022). *Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jombang*. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 1(10), 8-15.
- Priadi, R., & Roisah, K. (2019). *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 106-116.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia : Jakarta.
- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). *Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*. Jurnal Perspektif, 8(2), 72-76.
- Thalib, N A. (2014). *Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materil Pasal 214 UU No 10 Tahun 2008)*. Jurnal Cita Hukum, 2 (2), 234-248.
- Widdy, Y W. (2020). *Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik : Sebuah Kajian Teoritis*. Jurnal JISIPOL, 4(2), 126-142.
- Wijaksana, M B. (2004). *Modul Perempuan untuk Politik, Sebuah Panduan tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik*. Yayasan Jurnal Perempuan : Jakarta.